



Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2022-2024

Dini Dika Sari^{1*}, Yuliusman², Helen Parkhust³

^{1,2,3} Program Studi Keuangan Daerah, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Dinidikasari@gmail.com

Abstract: This study aims to evaluate the effectiveness and contribution of Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) to regional revenue in Jambi City during the 2022–2024 period. Local Own-Source Revenue is one of the crucial indicators used to measure regional fiscal independence, as it reflects the ability of local governments to finance development through revenue generated from within their own regions. The method applied in this study was descriptive quantitative, using secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), the Directorate General of Treasury (DJPB) of Jambi Province, and the Central Statistics Agency (BPS) of Jambi City. The analysis techniques used were the calculation of PAD effectiveness ratio and PAD contribution ratio to total regional revenue. The findings indicate that the effectiveness of PAD in Jambi City in 2022 reached 93.77%, categorized as effective; in 2023 it was 80.70%, categorized as fairly effective; and in 2024 it reached 83.45%, also categorized as fairly effective, with an average effectiveness of 85.97%. Meanwhile, the contribution of PAD to regional revenue in 2022 was 26.18%, in 2023 it was 27.02%, and in 2024 it was 25.79%, resulting in an average of 26.33%, which falls into the moderate category. Based on these findings, it can be concluded that the Government of Jambi City has been fairly effective in achieving PAD targets; however, the contribution of PAD to total regional revenue remains suboptimal, indicating that dependence on transfer funds from the central government is still relatively high. Therefore, efforts are needed to optimize PAD sources in order to improve regional fiscal independence in a sustainable manner.

Keywords: Contribution; Effectiveness; Local Own-Source Revenue; Ratio; Regional Revenue.

Abstrak: PAD merupakan salah satu indikator yang krusial untuk mengukur kemandirian fiskal daerah, karena menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan dengan sumber di dalam wilayahnya sendiri. Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Jambi, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi. Teknik analisis dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas PAD dan rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD di Kota Jambi pada tahun 2022 adalah 93,77% dengan kategori efektif, tahun 2023 sebesar 80,70% dengan kategori cukup efektif, dan tahun 2024 sebesar 83,45% dengan kategori cukup efektif, dengan rata-rata efektivitas mencapai 85,97%. Di sisi lain, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2022 adalah 26,18%, tahun 2023 sebesar 27,02%, dan tahun 2024 sebesar 25,79%, dengan rata-rata 26,33% yang termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Jambi berhasil dalam mencapai target PAD dengan cukup efektif, namun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih belum maksimal, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas; Kontribusi; Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Daerah; Rasio.

1. LATAR BELAKANG

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam mengelola keuangan, khususnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik (Ariyo Dewantoro, 2022). PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta

lain-lain pendapatan yang sah memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Yudhaningsih & Ariyanti, 2020). Semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan tanpa ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat (Helmi, 2025). Oleh karena itu, PAD menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penerimaan PAD masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pengelolaan potensi pendapatan daerah (Hartoto et al., 2025). Fluktuasi capaian PAD dari tahun ke tahun menjadikan analisis efektivitas dan kontribusi PAD penting dilakukan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan serta peran PAD terhadap total pendapatan daerah (Mufida et al., 2025; Arini, 2025). Selain itu, optimalisasi PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sari & Rahmawati, 2020), meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi serta pemanfaatan potensi ekonomi daerah (Putri & Syafitri, 2024). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa peningkatan PAD berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Dewantoro, 2022) dan perlu dievaluasi secara berkelanjutan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan pendapatan yang lebih efektif (Hartati & Wahyuni, 2025). Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Jambi tahun 2022–2024 perlu dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumen, laporan, publikasi resmi, arsip, maupun sumber lain yang telah tersedia dan dipublikasikan oleh instansi atau lembaga tertentu. Data tersebut meliputi data target Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi PAD, serta data pendapatan daerah Kota Jambi Tahun 2022–2024.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui portal resmi DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi melalui publikasi Kajian Fiskal Regional (KFR) dan dari Badan Pusat Statistik Kota Jambi melalui publikasi statistik daerah.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi pendapatan daerah, serta data pendukung lainnya yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, skripsi, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas, kontribusi, dan kinerja keuangan daerah sebagai landasan teori penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara menghitung, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan data keuangan daerah berdasarkan rasio keuangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah Kota Jambi Tahun 2022–2024.

3. KAJIAN PUSTAKA**Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (Suparto, 2020). Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana

darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Putri, 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siregar, 2021). Menurut (Hutauruk, 2023), PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Komponen-komponen PAD antara lain: (1) Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang; (2) Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti bagian laba dari BUMD; dan (4) Lain-lain PAD yang Sah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan lain sebagainya.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Anynda, 2020). Rasio efektivitas PAD dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Kriteria penilaian efektivitas PAD menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 adalah sebagai berikut: (1) di atas 100% dikategorikan sangat efektif; (2) antara 90%-100% dikategorikan efektif; (3) antara 80%-90% dikategorikan cukup efektif; (4) antara 60%-80% dikategorikan kurang efektif; dan di bawah 60% dikategorikan tidak efektif.

Tabel 1. Klasifikasi Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
= 100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber Mahmudi, 2016

Rasio kontribusi PAD digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah Kota Jambi. Rasio ini menunjukkan tingkat peranan PAD dalam mendukung penerimaan daerah dan menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Rumus perhitungan rasio kontribusi PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Hasil perhitungan rasio kontribusi PAD kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria kontribusi sebagai berikut.

Tabel 2. Klafikasi Kontribusi PAD

Persentase Kontribusi	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10,1% – 20%	Kurang
20,1% – 30%	Sedang
30,1% – 40%	Cukup Baik
40,1% – 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : Mahmudi 2016

Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis perkembangan PAD dilakukan untuk mengetahui peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dari tahun ke tahun selama periode 2022–2024. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan tren perkembangan PAD dalam mendukung pendapatan daerah. Rumus perhitungan perkembangan PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Perkembangan PAD} = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan atau penurunan PAD Kota Jambi setiap tahun selama periode penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Tahun 2022–2024

Tabel 3. Tingkat Efektivitas PAD Kota Jambi Tahun 2022–2024

Tahun	Target PAD (Rp Miliar)	Realisasi PAD (Rp Miliar)	Efektivitas (%)	Kriteria
2022	465,89	436,89	93,77	Efektif
2023	515,34	415,90	80,70	Cukup Efektif
2024	545,54	455,26	83,45	Cukup Efektif
Rata-rata	508,92	436,02	85,97	Cukup Efektif

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2022–2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3, hasil perhitungan efektivitas PAD Kota Jambi selama periode 2022–2024 menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada tahun 2022, tingkat efektivitas PAD Kota Jambi mencapai 93,77 persen, yang berada pada rentang 90%–100% sehingga dikategorikan efektif. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah yang cukup baik dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan pada tahun tersebut. Pada tahun 2023, tingkat efektivitas PAD mengalami penurunan menjadi 80,70 persen dan termasuk kategori cukup efektif. Penurunan ini terjadi karena peningkatan target PAD tidak diikuti oleh peningkatan realisasi PAD secara optimal.

Selanjutnya, pada tahun 2024 efektivitas PAD mengalami peningkatan menjadi 83,45 persen dan tetap berada pada kategori cukup efektif. Secara rata-rata, tingkat efektivitas PAD Kota Jambi selama periode 2022–2024 sebesar 85,97 persen dan termasuk dalam kategori cukup efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah cukup berhasil dalam merealisasikan target PAD yang ditetapkan, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2022–2024

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar peranan PAD dalam membentuk total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kontribusi PAD, semakin tinggi pula kemandirian fiskal daerah dan semakin rendah ketergantungannya terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 4. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2022–2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp Miliar)	Realisasi Pend. Daerah (Rp Miliar)	Kontribusi (%)	Kriteria
2022	436,89	1.668,66	26,18	Sedang
2023	415,90	1.539,45	27,02	Sedang
2024	455,26	1.765,18	25,79	Sedang
Rata-rata	436,02	1.657,76	26,33	Sedang

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2022–2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4 hasil perhitungan menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Jambi selama periode 2022–2024 berada pada kategori sedang (20,1%–30%). Pada tahun 2022, kontribusi PAD tercatat sebesar 26,18 persen, kemudian meningkat sedikit menjadi 27,02 persen pada tahun 2023, sebelum kembali menurun menjadi 25,79 persen pada tahun 2024. Secara rata-rata, kontribusi PAD Kota Jambi terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 26,33 persen.

Data ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah Kota Jambi masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Transfer masih mendominasi pendapatan daerah Kota Jambi dengan nilai sebesar Rp1.184,10 miliar pada tahun 2022, Rp1.083,21 miliar pada tahun 2023, dan Rp1.257,82 miliar pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Jambi masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun kontribusi PAD dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang relatif stabil di kisaran 25%–27%, hal ini belum mencapai level yang memuaskan mengingat Kota Jambi memiliki potensi ekonomi yang cukup besar sebagai ibu kota provinsi. Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi yang mencapai 5,63% pada 2022 dan 5,41% pada 2023 seharusnya dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara lebih signifikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Tahun 2022–2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PAD Kota Jambi periode 2022–2024 mengalami fluktuasi, namun secara umum berada pada kategori cukup efektif. Pada tahun 2022, efektivitas PAD mencapai 93,77 persen (efektif), kemudian menurun menjadi 80,70 persen pada tahun 2023 akibat peningkatan target PAD yang tidak diikuti oleh realisasi yang optimal. Pada tahun 2024, efektivitas PAD kembali meningkat menjadi 83,45 persen, meskipun masih berada dalam kategori cukup efektif. Secara rata-rata, tingkat efektivitas PAD selama periode 2022–2024 sebesar 85,97 persen, yang termasuk kategori cukup efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi cukup mampu merealisasikan target PAD, namun masih perlu mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah agar tingkat efektivitas dapat ditingkatkan.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2022–2024

Hasil analisis kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Jambi menunjukkan bahwa selama periode 2022–2024 kontribusi PAD berada pada kategori sedang secara konsisten. Pada tahun 2022, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tercatat sebesar 26,18 persen (kategori sedang). Pada tahun 2023, kontribusi PAD sedikit meningkat menjadi 27,02 persen (kategori sedang). Kemudian pada tahun 2024, kontribusi PAD kembali menurun menjadi 25,79 persen (kategori sedang). Secara rata-rata, kontribusi PAD Kota Jambi terhadap total pendapatan daerah selama periode 2022–2024 adalah sebesar 26,33 persen yang masuk

dalam kategori sedang berdasarkan kriteria Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah Kota Jambi masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat, yang rata-rata mendominasi sekitar 70 persen dari total pendapatan daerah. Kemandirian fiskal Kota Jambi belum dapat dikatakan optimal mengingat potensi ekonomi Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi yang seharusnya mampu mendorong penerimaan PAD yang lebih besar.

Secara keseluruhan, kedua hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi masih menghadapi dua tantangan utama dalam pengelolaan PAD, yaitu belum optimalnya pencapaian target PAD yang ditetapkan dalam APBD serta masih rendahnya peran PAD dalam struktur pendapatan daerah. Kedua kondisi ini perlu ditangani secara terpadu melalui kebijakan yang berfokus pada peningkatan basis penerimaan PAD dan perbaikan sistem administrasi keuangan daerah guna memperkuat kemandirian fiskal Kota Jambi dalam jangka panjang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan upaya pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar target pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara lebih efektif. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penguatan sistem administrasi, pengawasan, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah perlu terus dilakukan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penerimaan PAD.

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang serta menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah serta referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan kajian mengenai efektivitas dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Antwi, S., Atta, F., & Amponsah, E. (2021). Effectiveness of Local Government Revenue Mobilization and Its Contribution to Development Financing in Ghana. *International Journal of Economics and Finance*, 13(5).
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyo Dewantoro, D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. In *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business* (Vol. 1, Number 2). <https://journal.sinergicendikia.com/index.php/jimab/article/view/73>
- Badan Pusat Statistik Kota Jambi. (2024). *Kota Jambi Dalam Angka 2024*. Jambi: BPS Kota Jambi.
- Darise, N. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Deni Ariyanti dan Resi Yudhaningsih. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018.
- Desipradani, G., & Sucipto, H. (2024). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(2). <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/2075>
- Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38–47. <https://journal.yrpioku.com/index.php/msej/article/view/4317>
- Dewi, R. A., & Prasetyo, D. (2022). Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(3).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Data APBD dan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Hartati, S., & Wahyuni, R. (2025). Analisis efektivitas dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebagai upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 17(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/85812>
- Hartoto, T. ;, Andriani, A. F., Andriana, N., Nurkhamid, M., Yustiani, S., Rakhmawati, I., Sriyani, R., Aprilia, E., Sunyoto, E., Astuti, L., Kurniawati, R., & Dewi, A. (n.d.). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Teori Dan Praktik)*. Retrieved www.freepik.com
- Hidayat, S. A., Anwar, Suharsono, A., Laily, Y. M., Akbar, M. N. A., & Maulana, F. (2026). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota se-Jawa Timur tahun 2014–2023. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 2705–2718. <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i2.2132>

- Indonesia. 2022. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Daerah.
- Khoryani, P., Dharmawan, N. A. S., & Atmaja, I. M. D. (2025). Kontribusi komponen pendapatan asli daerah (PAD) terhadap realisasi PAD. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(1). <https://doi.org/10.23887/jap.v16i2>
- Kuncoro, M. (2018). Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, A., & Lestari, D. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan PAD Kota Pekanbaru Tahun 2019–2022. *Jurnal Keuangan Daerah*, 14(1).
- Mahsun, M. (2019). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2021). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2020). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur Shafira Anynda., Hermanto, B. S. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Vol. 9/(10). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3690>
- Nurjannah, V., Ardianti, A. S., & Pratama, D. (2024). Analisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau (2018–2022). *Media Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 73–80. <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/meb/article/view/3789>
- Nurjannah, V., Syifa Ardianti, A., & Pratama, D. (2024). Media Ekonomi dan Bisnis Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau (2018-2022). <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/abditeknika>
- Oluwole, T., & Adeyemi, K. (2021). Analysis of Internally Generated Revenue and Its Contribution to Total Revenue in Nigerian States. *Journal of Public Finance and Accounting*, 8(3).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pratama, R., & Susilo, H. (2022). Analisis Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2016–2020. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2).
- Putri, A., & Syafitri, N. (2024). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 4(2). <https://www.ejournal.polraf.ac.id/index.php/JIRA/article/view/727>
- Putri, D., & Wahyudi, A. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017–2021. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 11(1).
- Putri, R. N. H. (2024). Analisis potensi pendapatan asli daerah di 34 daerah ibu kota provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 3(1).) Vol. 3 No. 1, April 2024 <https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie>

- Ramadani, A. S., Yuliusman, Y., & Friyani, R. (2025). Pengaruh implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 4(3), 532–544.
- Ramadhan, F., & Nugroho, A. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2022. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 8(2).
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Rindiani, N., & Fauzan, M. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Sari, D., & Rahmawati, E. (2020). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 14(2). <https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JATA/article/view/424>
- Septiani, R., & Wulandari, S. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Jambi Tahun 2018–2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1).
- Setiawan, R., Yuliusman, Y., & Yetti, S. (2020). Analisis kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2015–2019. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(3), 310–319.
- Siagian, R., & Purba, J. (2021). Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap PAD Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 9(2).
- Silaban, A. Br., Zaharman, & Arini. (2025). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (studi kasus pada restoran di Kota Pekanbaru). *Finest: Jurnal Riset & Pengembangan Ekonomi Islam*, 9(2), 78. *Finest: Jurnal Riset & Pengembangan Ekonomi Islam*
- Sinaga, M., Zalukhu, R. S., Collyn, D., & Hutaaruk, R. P. S. (2023). Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kepulauan Nias: mediasi belanja modal. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 1070–1081. <https://doi.org/10.29210/0202312729>
- Siregar, A. R. S., Lubis, N. H., Isfa, F., & Muzayyana. (2025). Pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 5(1), 51–64. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i4.3424>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suparto. (2020). Otonomi daerah di Indonesia: Pengertian, konsep, tujuan, prinsip dan urgensinya. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan*, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Repository Universitas Islam Riau

- Syaikhy Rahman Helmi. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Produk Domestik Regional Bruto Dan Populasi Terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2023.
- Thanh, N. T., & Cuong, P. V. (2022). Local Revenue Effectiveness and Its Contribution to Local Government Budgets in Vietnam. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 14(1).
- Wahyuni, S., & Hasan, R. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran serta Kontribusinya terhadap PAD Kota Batam. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6(2).
- Wahyuni, S., Yuliusman, Y., & Rahayu, R. (2025). The influence of intellectual capital and corporate social responsibility on firm value with corporate reputation as an intervening variable. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 18(1), 551–563.
- Wasil, M., Syahdila Putri, N., Larasati, A., Mufida, N., Mufida Mohammad Wasil, N., Kesehatan dan Bisnis Surabaya, I., kunci, K., Asli Daerah, P., Perimbangan, D., & Keuangan Daerah, K. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. In Nurliana Mufida. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/>
- Widodo, J. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yani, A. (2018). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.